

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, 1993, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Absori. et.al., 2016, *Cita Hukum Pancasila: Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Achmad Ali, 2001, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- , 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia*, Renggang Education, Tangerang.
- Agustino, Leo, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amelia Hariyanti dan Yulita Pujilestari, 2019, *Sistem Politik Indonesia*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan.
- Bagir Manan, 2002, *Jalan Berbelit Menuju Pemerintahan yang Baik*, Makalah, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Charles F. Andrian, 1992, *Kehidupan Politik dan Pembahasan Sosial*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- David Held, (Pen. Abdul Haris), 2006, *Model of Democracy*, Akbar Tandjung Institute, Jakarta.
- Den Hertog, Johan A., 1999, *General Theories of Regulation*, in Bouckaert, De Geest (eds.), *Encyclopedia of Law and Economics*, Utrecht University, Edward Elgar Publishing Limited, Utrecht.
- Der Vlies, I.C. Van dalam Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Dwidjowidjoto, Riant Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta Elex Media-Gramedia, Jakarta.

- Fritz Edward Siregar, 2020, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- , 2020, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Gunardi Endro, 2017, *Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi*, Universitas Bakrie, Jakarta.
- Hamzah Halim, 2016, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hasyim Asy'ari, 2019, *Konsolidasi Demokrasi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Penerjemah Sahat Simamora, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ibnu Tricahyo, 2009, *Reformasi Pemilu (Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal)*. In – Trans, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- , 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Jeffrey M. Paige, 1971, *Political Orientation and Riot Participation*, American Sociological review, Juga Alfian, 1983, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- John Rawls, 2011, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem a Social Science Perspective)*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung.
- Leo Agustino, 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mahfud MD., 1989, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres, Yogyakarta.
- , 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.

- Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Muhadam, 2014, *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung.
- Paul R. Abramson, 1995, *Political Participation* dalam Seymour M. Lipset (ed), 1995, *The Encyclopedia of Democracy*, Vol. III, Congressional Quarterly Inc), Washington D.C.
- Ramlan Surbakti, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta.
- Rudi Hartono dan Ulfa Ilyas, 2013, *Bung Karno: Nasionalisme, Demokrasi dan Revolusi*, PT Berdikari Nusantara Makmur, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho, *Membumikan Hukum Pancasila sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan*, Dalam Absori. et.al., 2016, *Cita Hukum Pancasila: Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Sirajuddin, 2008, *Jurnal Transisi (Media Penguatan Demokrasi Lokal)*. In – Trans, Malang.
- Soedarsono, 2005, *Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi*, Jakarta Makassar Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wibowo, Pramono Anung, 2013, *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sumber Jurnal:

Agus Budi Santoso, 2015, *Eksistensi dan Problematika Calon Independen dalam Pemilukada Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1 No. 2.

Elih Dalilah, dkk. 2019, *Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS Komisi Pemberantasan Korupsi, 5 (1), 181-188.

Jejen Fauzi Ridwan, 2015, *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4.

Komisi Pemilihan Umum, *Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Edisi III Maret- April 2015*, hlm. 04

- Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial, 8 (1) Januari 2018, 1-6, p-ISSN: 1410-881X (Print)
- Lukman Ali, 2015, *Hukum Islam: Antara Superior dan Inferior dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum Universitas Islam Makassar, Volume 13, Nomor 1 (Januari 2015).
- Muhammad Helmi, 2015, *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015).
- Sacra Insan Sing Adiluhung, Ratna Herawati, dan Retno Saraswati, 2017, *Kajian Normatif terhadap Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pekalongan*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2.
- Tasbir dan Ahkam Jayadi. 2020. *Mekanisme Verifikasi Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan*. Alauddin Law Development (ALDEV) Volume 2 Nomor 1 (Maret 2020).
- Titi Anggraini, 2016, *Evaluasi Pemilukada Serentak 2015*, Pemilu dan Demokrasi, 8 (April 2016).
- Warjiyati, Sri, 2018, *Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Justicia Islamica*, UIN Sunan Ampel Surabaya Volume 15, Nomor 1 (Juni 2018).

Sumber lainnya:

e-book penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 dan 2017 KPU RI dan website kpu.go.id

<https://cerdika.com/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli/#:~:text=Aturan%20mayoritas.-,22.,kepenting%20secara%20aktif%20dan%20bebas>

https://jdihn.go.id/files/148/putusan_sidang_Putusan5PUUV2007ttgPilkadAlIndependenTgl23072007.pdf

<https://kbbi.web.id/batas>

<https://kbbi.web.id/integritas>

<https://kbbi.web.id/sanksi>

<https://kkp.go.id/brsdm/bdasukamandi/artikel/19129-makna-sebuah-integritas#>

<https://media.neliti.com/media/publications/108571-ID-eksistensi-calon-independen-pemilihan-ke.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/229182-pemilihan-kepala-daerah-secara-langsung-bbadb936.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/85218-none-7550fab4.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/03/16574191/mendagri-tegur-103-kepala-daerah-terkait-asn-korup-ini-rinciannya?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/23/12090221/verifikasi.faktual.kunci.keberhasilan.calon.perseorangan>

<https://nasional.tempo.co/read/1435647/survei-lsi-soal-kepercayaan-publik-dpr-dan-parpol-urutan-paling-buncit/full&view=ok>

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/02/13/p42sea384-kpu-banyak-calon-independen-gugur-di-pilkada-2018>

<https://news.detik.com/berita/d-5270765/kutip-data-kemendagri-kpk-paparkan-biaya-calon-kepala-daerah-capai-rp-100-m>

<https://nusantara.rmol.id/read/2020/02/12/421166/bawaslu-syarat-dukungan-palsu-calon-perseorangan-bisa-dihukum-6-tahun-penjara>

<http://perludem.org/2018/01/24/perludem-syarat-calon-independen-di-pilkada-tak-mudah/>

<https://poltracking.com/2017/11/26/survei-poltracking-76-publik-percaya-pada-tni/>

<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/5012/Rico%20Sajai%20Sianturi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/politik/671755/pengamat-sebut-dua-kendala-calon-perseorangan-di-pilkada>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-hukum/>

<https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/05/2021/survei-puspoll-kepercayaan-publik-pada-dpr-dan-parpol-masih-jeblok/>

<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>

<https://www.liputan6.com/news/read/369882/calon-independen-sulit-ikut-pilkada-dki-jakarta>

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_114_5+PUU-V+2007.pdf

<https://www.tagar.id/kepercayaan-publik-terhadap-dpr-dan-parpol-paling-rendah>

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-demokrasi/>